

BAB I PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 1998, terjadi sebuah fenomena sosial dan politik yang sangat mengejutkan di Indonesia. Rezim otoriter orde baru yang memiliki hegemoni politik dan ekonomi yang sangat kuat tumbang dari kekuasaan. Demokrasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat didengung-dengungkan oleh kelompok mahasiswa yang menginginkan perubahan. Reformasi yang menjadi tema sentral dari perubahan itu telah membawa implikasi yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Itulah keinginan kita semua yang sampai saat ini masih kita impikan bersama.

Di samping dampak positif yang dilahirkannya, tanpa disadari perubahan itu sekaligus telah memunculkan gejala sosial baru dalam tatanan masyarakat yang sekaligus mengancam stabilitas dan integrasi bangsa. Betbagai rentetan peristiwa kerusuhan dan konflik yang berbau SARA yang terjadi akhir-akhir ini mulai dari kasus Ambon, Poso, Sampit dan di daerah-daerah lainnya telah menjadi bukti betapa stabilitas dan integrasi bangsa ini sedang diuji. Korban jiwa dan materi sudah tidak terhitung lagi. Apakah ini merupakan tumbal bagi sebuah perubahan dari pemerintahan yang otoriter menuju kepada pemerintahan demokratis yang sebenarnya? Betapa berat pengorbanan yang harus dilakukan oleh bangsa kita. Ini semua kembali kepada kita, kuatkah kita menyongsong perubahan itu sendiri atau memang kita belum sia untuk berubah?

Konflik antar etnis tampak semakin lama semakin meruncing. Sebagai contohnya kerusuhan yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan baik di Sambas maupun di Sampit. Persatuan Indonesia benar-benar terkoyak, sangat menyedihkan. Bentrok antar kedua etnis ini di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun lalu yang belum tertangani, kini malah muncul kasus serupa di Kalimantan Tengah. Kalau pun diberitakan bahwa kerusuhan di Sambas hanya terjadi karena serempetan

faktor pemicu. Sebelumnya kedua etnis ini sering berselisih paham. Orang Madura diukiskan sebagai orang yang kurang bisa berbaur dengan masyarakat setempat dan mudah tersinggung (www. gatra.com, 22/11/05). Apapun faktor pemicunya, ketika akar perselisihan sudah ada, tentu saja hal ini akan cepat menyulut pertikaian.

Sebagai gejala sosial, seperti yang dikemukakan oleh Mulyana .W. Kusuma (dalam Danunjaja, 1999:261) , konflik komunal seperti ini merupakan gejala global yang umum terjadi di negara yang sedang melalui transisi demokrasi. Mungkin kita bisa membandingkannya dengan berbagai kerusuhan dan pertikaian yang berbaur SARA yang terjadi di beberapa negara pecahan Uni Soviet maupun di Jazirah Balkan. Dalam konflik semacam ini, selalu di satu pihak ada elemen identitas seperti SARA, serta di lain pihak ada elemen ketidakadilan sumber daya ekonomi. Biasanya eskalasi konflik akan cenderung eksplosif jika kedua elemen ini bercampur satu sama lain.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi, berbagai usaha sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik komunal yang terjadi. Namun langkah-langkah penyelesaian itu selalu menemui jalan buntu dan tidak berjalan secara maksimal. Hasil proses penyelesaian konflik hanya bersifat sesaat. Terbukti dalam kasus penyelesaian konflik Ambon setelah ditandatangani kesepakatan damai antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkonflik. Demikian juga dengan deklarasi Malino yang diupayakan sebagai resep bagi rujuknya kedua kelompok etnis yang bertikai, tidak juga efektif. Ironisnya ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan dana deklarasi ini, dan tujuan yang sebenarnya menjadi tenggelam alias gagal. Selang beberapa bulan kemudian konflik di Ambon kembali terjadi. Demikian juga di Poso, pertikaian tetap terjadi tanpa mempedulikan kesepakatan yang telah dibuat. Pemerintah terlihat tidak kredibel di mata mereka. Bahkan sampai saat ini pun Ambon dan Poso tidak berhenti didera konflik meski dengan motif beragam.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami berasumsi bahwa telah terjadinya ketidakefektifan dalam penanganan konflik komunal yang terjadi di Ambon dan Poso.

Hal ini menyebabkan proses penyelesaian konflik tidak dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan asumsi di atas kami memiliki *sense of interest* untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan ini dalam pepekui komunikasi antar budaya.

Meski banyak orang mengatakan bahwa pertikaian yang terjadi di Ambon, Poso, dan Sampit lebih didominasi masalah kecemburuan sosial, namun tentu juga disebabkan unsur budaya yang saling tidak dipahami. Menurut penuturan seorang warga Madura, dikatakan bahwa orang Dayak merasa tersinggung ketika *tanah* milik nenek moyang mereka digarap oleh orang Madura tanpa apresiasi yang sewajarnya (wawancara dengan warga Madura, Januari 2006). Kalau direnungkan, apa sebenarnya makna *tanah* di sini. Di balik ketersinggungan mereka, pasti ada simbol-simbol yang tersembunyi dalam budaya mereka. Mungkin *tanah* di sini merupakan simbol kesakralan yang harus dijaga dengan mati-matian, atau mungkin ada alasan lain untuk hal ini. Sebenarnya hal seperti inilah yang menarik untuk dikaji. Sebuah pemaknaan terhadap simbol yang tidak dimengerti oleh etnis lain. Sementara jika hal ini dilanggar akan mengakibatkan ketersinggungan dan meledaknya konflik etnis.

Berdasarkan latar belakang masalah tadi akhirnya bisa ditarik sebuah rumusan permasalahan yang sifatnya holistik yaitu :

1. Bagaimana terjadinya konflik antar etnis tersebut (proses dan kronologinya)?
2. Mengapa sampai terjadi konflik antar etnis tersebut ?
3. Bagaimana pendapat/ tanggapan dari pelaku-pelaku konflik dalam upaya penyelesaian konflik di daerahnya?

Ketiga pertanyaan tadi akan dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan penelitian